

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Badruzaman, M. D. (2006). *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*.
- (2014). *Aneka Hukum Bisnis* (4th ed.). Bandung alumni.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Peradaban.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- (2017). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2021). *Hukum perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (5th ed.). Kencana.
- Khairandy, R. (2017). *Iktikad Baik Dalam Kontrak : Di Berbagai Sistem Hukum*. FH UII Press.
- Marbun, B. N. (2009). *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*.

Puspa Swara.

Meliala, D. S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (6th ed.). Penerbit Nuansa Aulia.

Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum : Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka.

Miru, A. (2013). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.

Miru, A., & Pati, S. (2018). *Hukum perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (8th ed.). Raja Grafindo Persada.

Muhammad, A. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.

----- (2017). *Hukum Perdata Indonesia* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (1st ed.). Rajawali Pers.

Patrik, P., & Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Rahmawati, T., & Supratiningsih, U. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*.

Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2012). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Fikahati

Aneska.

Rusli, H. (1993). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan.

Said, S. H. (2008). *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*. Raja Grafindo Persada.

----- (2017). *Hukum kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.

----- (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Perkasa.

Said, S. H., Abdullah, & Wahyuningsih, W. (2017). *Perancangan kontrak & Memorandum Of Understanding (7th ed.)*. Sinar Grafika.

Satrio, J. (2018). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta.

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan*

Kaidah Hukum (1st ed.). Prenadamedia Group.

----- (2019). *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi*

Syariah (1st ed.). Prenadamedia Group.

Subekti, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.

----- (2009). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.

Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

Syahmin. (2017). *Hukum Kontrak Internasional*. Rajawali Pers, Raja grafindo Persada.

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. (2020). □ *Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Redaksi:

Widjaya, I. G. R. (2007). *Merancang Suatu Kontrak* (H. Sudrajat (Ed.)). Kesaint Blanc.

B. Sumber Lain

1) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen ke- IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang
Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tentang
Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012

2) Jurnal

Aprilianti. (2011). Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan
Lessor. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 315–323.

- Hartanto, H., & Wilda Meutia Syafiina, C. (2021). Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana). *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1), 54–72. <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.6765>
- Juanda, E. (2021). Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 273–286. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256>
- Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204–226. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.23>
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 48–56. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>
- Sanjaya, D. B., & Tamsil. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2 / PUU-XIX / 2021 BAGI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA (KREDITUR). *Jurnal Vonum*, XX(XX), 107–121.

Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–20.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400>

Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

Wulandari, E. S., Ridwan, & Syarifuddin, A. (2020). Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 59–70.
<https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>

3) Lainnya

DESY KRISTI YANTI. (2021). *Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2021/11/27/144336726/me>

ngenal-ojk-sejarah-berdiri-tugas-fungsi-dan-wewenangny?page=all#:~:text=OJK adalah lembaga yang sudah,kegiatan jasa keuangan di Indonesia.&text=OJK adalah terbentuk berdasarkan Undang,2011 Tentang Otor

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (2016). Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*. Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Permatasari, E. (2021). *Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/>

Sardiman Saad. (2019). *Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Setiawan, T. (2012). *Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian*. Wordpress.Com. <https://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>